KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Senayan Waspadai 8 Tantangan Ekonomi
Tanggal : Senin, 03 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Senayan Waspadai 8 Tantangan Ekonomi

KETUA Badan Anggaran DPR Said Abdullah mewaspadai delapan tantangan yang akan dihadapi ekonomi Indonesia di 2022.

Pertama, meluasnya varian Omicron. Hal ini bikin ekonomi ketar ketir. Kedua, kenaikan harga komoditas, khususnya minyak bumi dan gas terus naik di 2022. Hal ini berkonsekuensi terhadap membesarnya kebutuhan subsidi energi.

"Pemerintah harus segera melakukan reformasi subsidi energi agar plafon subsidi energi di tahun depan sebesar Rp 134 triliun tidak membengkak. Lebih penting lagi agar subsidi energi lebih tepat sasaran," ungkap Said, Jumat (31/12).

Ketiga, meningkatnya angka kemiskinan akibat pandemi Covid-19. Diperkirakan tingkat kemiskinan di akhir 2021 sebesar 10,25 persen.

Keempat, pasar keuangan global kemungkinan besar masih akan menghadapi ketidakpastian. Kelima, pandemi Covid-19 masih akan terjadi di sejumlah negara

"Situasi ini berpotensi adanya stagflasi dan *supply chain disruption*. Pemerintah perlu memitigasi suplai komoditas kita yang berasal dari luar negeri," jelasnya.

Keenam, lanjut Said, kebijakan ekonomi hijau menjadi tuntutan masyarakat global. Ketujuh, beban bunga dan pokok utang yang berpotensi terus naik menjadi beban fiscal. Dan, kedelapan makin meluasnya penggunaan mata uang kripto.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan berharap, capaian ekonomi 2021 menjadi modal positif untuk menghadapi 2022. Menurutnya, capaian ekonomi 2021 meskipun belum maksimal namun tumbuh positif dibanding pada 2020 yang tumbuh minus 2,07 persen.

"Capaian 2021 itu bisa menjadi pijakan untuk mewujudkan pertumbuhan yang lebih tinggi pada 2022," ungkapnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal III-2021, kinerja lapangan usaha utama seperti industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan, tumbuh positif. Sementara, lapangan usaha mobilitas seperti penyediaan akomodasi dan makan-minum serta transportasi dan pergudangan masih mengalami kontraksi. Sektor ini perlu diberi stimulus lagi. ■ **KPJ**

PERPUSTAKAAN DPR-RI